

Dinamika Pendidikan Indonesia dan Turki: Studi Komparatif

Nursyahbani Chusnul Novita¹, Ayu Sofya², Saipul Annur³, Afriantoni⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email : nursyahbanichusnulnovita@gmail.com¹, ayusofya576@gmail.com²,

saipulannur_uin@radenfatah.ac.id³, afriantoni_uin@radenfatah.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan Turki dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik studi komparatif. Sistem pendidikan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengintegrasikan aspek agama dan modernitas, sementara Turki berlandaskan prinsip Kemalisme dengan orientasi sekularisme. Perbedaan latar belakang sejarah dan ideologi mempengaruhi struktur, kurikulum, dan pendekatan pendidikan di kedua negara. Indonesia menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil dan keulaitas tenaga pengajara yang beragam. Turki menitikberatkan pada modernisasi pendidikan dengan penekanan pada sains dan teknologi. Melalui perbandingan ini, kedua negara memiliki peluang untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik guna menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan. Pendidikan bisa menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi.

Kata Kunci: *Dinamika Pendidikan, Indonesia, Perbandingan Pendidikan, Turki.*

The Dynamics of Indonesian and Turkish Education: A Comparative Study

Abstract

This research compares the education systems in Indonesia and Turkey using a qualitative approach and comparative study technique. Indonesia's education system is based on the values of Pancasila, which integrates aspects of religion and modernity, while Turkey's is based on the principles of Kemalism with an orientation towards secularism. Differences in historical and ideological backgrounds affect the structure, curriculum, and approach to education in both countries. Indonesia faces the challenges of disparities in access to education in remote areas and the diversity of teaching staff. Turkey focuses on modernising education with an emphasis on science and technology. Through this comparison, both countries can learn from each other and share best practices to create inclusive, adaptive, and sustainable education policies. Education can be a catalyst to improve the quality of human resources in the era of globalisation.

Keywords: *Education Dynamics, Indonesia, Comparative Education, Turkey.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah aspek fundamental dalam berdirinya suatu negara. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah dan tujuan nasionalnya. Pendidikan secara bahasa berasal dari kata Yunani, *Paedagogy*. *Paedagogy*

sendiri berarti seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan (Ahdar, 2021) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ketrampilan serta akhlak mulia yang diperlukan dirinya saat terjun ke masyarakat (BP et al., 2022).

Pendidikan sendiri memegang peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan pembangunan satu bangsa. Setiap negara mempunyai pendekatan dan kebijakan pendidikan sesuai dengan konteks sejarah, sosial, dan politik masing-masing negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang merata. Sistem Pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Rodliyah, 2021). Namun keberagaman geografis, sosial dan budaya Indonesia sering kali menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan pendidikan terutama di daerah terpencil.

Di sisi lain, Turki sendiri memiliki sejarah panjang dalam pendidikan. Pendidikan di Turki dipengaruhi oleh warisan Kesultanan Utsmaniyah dan reformasi modern yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Salah satu reformasi terbesar Atatürk adalah menerapkan sistem pendidikan sekuler untuk mempercepat modernisasi bangsa. Turki juga dikenal dengan pendekatan pendidikan terpusat yang dikendalikan Kementerian Pendidikan Nasional Turki.

Pada kajian pustaka akan diuraikan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah ada dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa judul penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Artikel yang berjudul "Studi Perbandingan Implementasi Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Perempuan di Indonesia dan Turki" yang ditulis oleh Andi Hugeng dan Anna Erliyana. Dalam penelitiannya membahas isu kesetaraan akses pendidikan di Indonesia dan Turki, terutama terkait tantangan yang dihadapi kelompok marjinal. Fokus penelitian ini terletak pada kesetaraan gender, membahas diskriminasi pendidikan terhadap perempuan di daerah terpencil dan perempuan hamil. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih membahas bagaimana perspektif hukum dari kedua negara tentang diskriminasi yang dihadapi perempuan dalam dunia pendidikan. Penelitian penulis membahas bagaimana perbandingan sistem pendidikan kedua negara yang dilihat dari sisi sejarah, hukum dan politik.

Artikel yang berjudul "Perbandingan Sistem Pendidikan Turki dan Indonesia" yang ditulis oleh Novita Sari dan Komarudin Sassi. Pada penelitian ini membahas kesamaan dan perbedaan struktur pendidikan, kebijakan kurikulum antara kedua negara. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh globalisasi mempengaruhi pendidikan Turki. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada tantangan domestik seperti kesenjangan akses dan kualitas pendidikan.

Perbandingan kedua sistem pendidikan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan kebijakan. Di Indonesia, pendidikan cenderung memadukan nilai-nilai keagamaan dengan pendidikan umum, dilihat dari sistem madrasah yang berkembang pesat. Sementara Turki menekankan pendidikan sekuler sebagai dasar utama. Perbedaan ini mencerminkan masing-masing latar belakang sejarah negara, dimana Indonesia berakar

pada tradisi masyarakat multikultural dan religius sedangkan Turki berorientasi pada reformasi modernisasi berbasis negara bangsa. Indonesia dan Turki merupakan dua negara dengan latar belakang sejarah yang berbeda, namun memiliki beberapa kesamaan dalam perjalanan modernisasi pendidikan.

Melalui perbandingan ini diharapkan bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem pendidikan. Hal ini tidak hanya relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masing-masing negara, tetapi juga sebagai pembelajaran lintas negara untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era tantangan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis dan membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan Turki. Metode studi komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada pada sistem pendidikan Indonesia dan Turki. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berfokus pada pemaparan sistem pendidikan kedua negara berdasarkan variabel tertentu seperti ideologi, kurikulum, aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Data yang dikumpulkan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan, jurnal akademik, buku referensi, serta artikel ilmiah terkait sistem pendidikan Indonesia dan Turki. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Sistem Pendidikan dan Letak Geografis Negara Indonesia

Menurut Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan total 13.466 pulau, luas daratan Indonesia mencapai 1.9922.570 km², sementara luas wilayah perairannya sebesar 3.257.483 km². Informasi ini didasarkan pada data geospasial yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Potensi et al., 2021). Mengutip situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² merupakan laut, termasuk 2.55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada awal mulanya sebelum kedatangan Belanda, Indonesia sebelumnya kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16 kemudian disusul oleh Bangsa Spanyol. Ketika bangsa Portugis tiba di Indonesia perdagangan cengkih berpusat pada daerah-daerah kerajaan Islam yaitu Ternate dan Tidore (Makmur et al., 1993). Bangsa Portugis kemudian pindah ke Semenanjung Leitimot dan mendirikan sebuah benteng yang kemudian menjadi Kota Ambon. Portugis membuka perkebunan pohon cengkih dan sampai akhir abad ke 16 terciptalah suatu *balance of power* antara orang Portugis di Leitimor dan orang Islam di Hitu serta orang Ternate di Semenanjung Hoamoal.

Pada tahun 1536 pada masa-masa kedudukan orang Portugis di Maluku penguasa pada saat itu Antonio Galvano mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak para pemuka pribumi di Ternate. Murid-murid yang berasal dari golongan pribumi bisa melanjutkan studinya di Goa (India) yang merupakan pusat kekuatan orang-orang Portugis di Asia (Makmur et al., 1993). Tahun 1546 terdapat tujuh buah kampung pemeluk Agama Katolik

Roma. Saat bangsa Portugis sedang berperang dengan Bangsa Spanyol dan Inggris, Belanda datang kemudian merebut kekuasaan. Akhir abad ke 16 dan awal ke 17 Belanda datang untuk menanam dan memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Ketika tahun 1585 Portugal jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Spanyol yang beragama Katolik Roma. Orang Belanda yang beragama Kristen Protestan sedang berjuang dari penjajah Spanyol melalui perang 80 tahun. Mata pencaharian menjadi sulit bagi orang-orang Belanda sehingga mereka mencari secara langsung bahan-bahan dagang terutama rempah-rempah. Belanda kemudian menuju nusantara untuk mendapatkan bahan-bahan mentah tersebut serta untuk memperdagangkan rempah-rempah tersebut.

Sistem Pendidikan di Indonesia pada zaman Kolonial Belanda

Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan kepentingan perdagangan. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah Belanda melalui keputusan sidang Staten General memberikan kekuasaan penuh kepada perserikatan kongsi dengan Belanda di Hindia Timur, yaitu VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*). VOC diberi kekuasaan untuk menjalankan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Awalnya kedatangan orang Belanda ke Indonesia bertujuan untuk menjalin hubungan dagang dengan masyarakat setempat. Namun sambil berdagang, mereka juga berupaya mempengaruhi penduduk lokal. Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan, tetapi secara bertahap berhasil menaklukkan penguasa-penguasa lokal dan merebut wilayah mereka, yang kemudian dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Hal ini menjadi awal dari berlangsungnya sistem penjajahan (Novita Sari & Komarudin Sassi, 2023).

Pada pertengahan abad 19 Belanda mulai membuka sekolah seperti ELS (*Europeesche Lagare School*). Sekolah ini menggunakan model pendidikan barat modern. Pendidikan gaya barat terus berkembang seiring dengan menguatnya kekuasaan orang Belanda di Indonesia. Pada 1818 Belanda mengeluarkan peraturan mengenai persekolahan. Peraturan ini hanya membahas pendidikan bagi anak-anak orang Belanda saja. Tingkat pendidikannya terbagi menjadi pendidikan dasar ELS (*Europeesche Lagare School*) dan pendidikan menengah HBS (*Hogere Burger School*). Sementara itu pendidikan untuk anak-anak pribumi dilakukan di halaman kabupaten, gubuk dan di daerah-daerah. Pelaksanaannya dilakukan dengan sederhana karena urusan sekolah pribumi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat (Dzakiyya Azizah et al., 2024). Selain sekolah Eropa bagi anak-anak orang Belanda dan Sekolah Bumiputra untuk masyarakat Pribumi Kelas bawah terdapat sekolah Agama yang berlandaskan nilai-nilai ke Islam. Sekolah agama yaitu pesantren dan madrasah menjadi alternatif bagi pendidikan tradisional masyarakat pribumi.

Pendidikan di Indonesia telah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan pada zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Sebelum kedatangan Belanda pendidikan Islam telah ada dan mulai berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Pelaksanaannya juga sangat sederhana dibandingkan pendidikan bangsa Belanda. Pendidikan Islam berjalan dan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebaran Islam. ketika Belanda datang pendidikan Islam mulai mengalami hambatan. Belanda membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang intinya menghambat dan menghalangi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam (Kodir, 2018). Pada tahun 1832 Belanda

membentuk lembaga *Presterraden* yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. kemudian pada tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yaitu tidak semua orang boleh memberikan pelajaran mengaji. Tahun 1932 juga keluar peraturan yang bisa memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda.

Kehadiran Belanda tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Dampak dari ikut campurnya Belanda pada pendidikan bagi orang Islam adalah terbentuknya dua golongan pendidikan di Indonesia pada abad ke-20 yaitu (Kodir, 2018) : Pertama, Pendidikan yang diberikan oleh sekolah Barat yang sekuler. Kedua, Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang pada kurikulumnya berfokus pada ajaran-ajaran Agama. Pada masa itu masyarakat Indonesia mengenal dua bentuk lembaga pendidikan yaitu pendidikan yang dikelola umat Islam dan pendidikan yang dikelola kolonial. Sistem pendidikan kolonial mengajarkan pendidikan modern liberal dan netral agama.

Pada awal abad ke-20 Belanda kemudian mendirikan sekolah-sekolah modern seperti HIS, MULO, AMS dan sekolah teknis. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan beberapa sekolah modern di Hindia Belanda sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan dan menciptakan tenaga kerja terdidik. Sekolah ini meliputi *Hollandsch Inlandische School* (HIS). *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Algemeene Middelbare School* (AMS). *Hollandsch Inlandische School* (HIS) merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak kalangan elite pribumi. Di sekolah ini para muridnya diajarkan bahasa Belanda dan program belajar selama tujuh tahun (Afandi et al., 2020). Kemudian didirikan sekolah lanjutan MULO pada tahun 1914. Pada tahun 1915 komisi yang dipimpin Prof. Dr. J. Woltjer membentuk sekolah menengah dengan nama *Algemeene Middelbare School* (AMS).

Kedatangan Belanda ke Indonesia awalnya bertujuan untuk perdaagangan, tetapi kemudian berkembang menjadi penjajahan yang mencakup berbagai aspek termasuk pendidikan. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan sekolah dengan sistem modern namun diskriminatif. Sekolah seperti ELS, HBS, HIS, MULO, dan AMS dirancang terutama untuk anak-anak Belanda dan kaum elit pribumi, sedangkan pendidikan untuk anak pribumi berlangsung sederhana dengan minim dukungan dari pemerintah. Pendidikan Islam yang sebelumnya berkembang pesat mulai terhambat akibat kebijakan kolonial yang membatasi perkembangan sekolah agama seperti madrasah dan pesantren. upaya modernisasi dilakukan Belanda memperkuar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dampak dari dualisme ini masih dirasakan sehingga mempengaruhi pola pendidikan di Indonesia.

Sistem Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Indonesia setelah meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sistem pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah baru berusaha untuk membangun dan memperbaiki sistem pendidikan yang telah terpuruk selama masa penjajahan. Salah satu awal yang penting adalah pembentukan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan pada 19 Agustus 1945 dengan Ki Hadjar Dewantara sebagai menteri pertama (Dzakiyya Azizah et al., 2024). Sejak kemerdekaan beberapa kurikulum telah diperkenalkan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kurikulum pada tahun 1945-1950 berfokus

pada pendidikan dasar dengan penekanan pada pelajaran bahasa dan berhitung. Sekolah Rakyat (SR) didirikan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

Pemerintah mengimplementasikan pendidikan dasar wajib yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf yang masih tinggi pada saat kemerdekaan, sekitar 90 % penduduk masih buta huruf (Koleksi Museum, 2021). Berbagai lembaga pendidikan baru didirikan termasuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Kemudian setelah masa awal Indonesia memasuki Masa Orde Lama tahun 1959-1966. Sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde lama berlangsung dari 1945 hingga pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (Kurnia & Hudaidah, 2021). Pendidikan di era ini diatur oleh beberapa undang-undang penting, yaitu (Fadli & Kumalasari, 2019) : Pertama, UUD 1945 : Pasal 31 mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, UU No.4/1950: Menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kemudian disempurnakan menjadi UU No.12/1954. Ketiga, UU No. 22/1961: Mengatur tentang pendidikan tinggi. Kurikulum selama masa Orde lama mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan politik dan sosial pemerintah. Pertama, kurikulum 1952, yang memperkenalkan mata pelajaran yang mendukung ideologi dan kebijakan politik Soekarno (Kurnia & Hudaidah, 2021). Kedua, indoktrinasi pendidikan, pendidikan digunakan sebagai alat untuk mendukung legitimasi kekuasaan pemerintah, dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan Ideologi Manipol/USDEK (Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945).

Pendidikan pada masa Orde Lama memiliki beberapa jenjang seperti, Sekolah Rakyat (SR) setara dengan SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tinggi (SMT), kemudian Sekolah Pendidikan Teknik dan Kewanitaan yang dikenalkan untuk memenuhi kebutuhan kerja terampil dan mendukung peran perempuan dalam masyarakat (Datumula, 2020). Setelah mengalami pergeseran Presiden, sistem Indonesia memasuki babak baru yaitu sistem pendidikan Orde Baru. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966-1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem pendidikan pada masa ini mengalami perubahan yang signifikan. Kebijakan pendidikan pada periode ini ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan jumlah lulusan pendidikan formal (Kurnia & Hudaidah, 2021).

Pendidikan pada era Orde Baru menggunakan beberapa kurikulum. Pertama, kurikulum 1968, memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berfokus pada penguasaan mata pelajaran dasar. Kedua, kurikulum 1975-1984 menekankan pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan membentuk karakter bangsa. Ketiga, kurikulum 1994 dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi, yang berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan keterampilan siswa (Datumula, 2020). Jenjang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari beberapa jenjang seperti, SD dan SMP menjadi wajib bagi semua anak, SMA dan SMK diperkenalkan untuk mempersiapkan siswa menuju perguruan tinggi atau dunia kerja, dan yang terakhir pendidikan tinggi atau universitas dan institut dibangun untuk menghasilkan tenaga profesional yang dibutuhkan negara.

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami masa kerusuhan pada bulan Mei. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran masal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden

Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 Tahun. Kemudian dimulai sistem pendidikan masa Reformasi setelah rezim Orde Baru jatuh pada tahun 1998.

Pendidikan di era Reformasi ditandai dengan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum menjadi aspek penting dalam era Reformasi pendidikan. Salah satu kurikulum pada era Reformasi adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Kurikulum ini merupakan konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu (Qurota Aini et al., 2024). Selain KBK selanjutnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. KTSP memberi otonomi kepada sekolah dalam menyusun silabus (Novi Septian & Lilis Apriliani, 2022). Kemudian kurikulum 2013. Kurikulum ini berfokus pada mengintegrasikan sikap, keterampilan dan pengetahuan serta menekankan pengalaman belajar aktif bagi siswa.

Selanjutnya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, kurikulum merdeka merupakan insiatif terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia yang mulai diterapkan secara luas sejak tahun 2022. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, fokus pada materi esensial dan mengembangkan karakter serta kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif terutama setelah dampak pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya (Kemendikbud, 2024). Kurikulum merdeka menggunakan tiga tipe kegiatan pembelajaran. Pertama, tipe pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan di dalam kelas yang dilakukan secara terdiferensiasi. Kedua, tipe pembelajaran kurikuler, dengan mengintegrasikan proyek-proyek yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ketiga, tipe pembelajaran ekstrakurikuler, kegiatan di luar jam pelajaran reguler yang sesuai minat siswa.

Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah secara bertahap membangun sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas untuk mengatasi dampak penjajahan, seperti tingginya angka buta huruf. Dimulai dengan pendirian Kementerian Pendidikan pada Agustus 1945, berbagai kebijakan dan kurikulum telah diterapkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kurikulum 1945 hingga kurikulum Merdeka pada 2022. Pada masa Orde Lama, pendidikan diarahkan untuk mendukung ideologi dan stabilitas politik, sementara Orde Baru berfokus pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Era Reformasi membawa pendekatan baru yang lebih fleksibilitas, relevansi materi, dan pengembangan karakter siswa dalam menghadapi tantangan global. Transformasi sistem pendidikan Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan generasi yang terampil, berkarakter, dan kompeten dalam menjawab tuntutan zaman, meskipun tantangan seperti kesenjangan akses dan kualitas pendidikan tetap perlu diatasi.

Sejarah Sistem Pendidikan di Turki

Pada Abad pertengahan terdapat tiga kerajaan Islam besar yaitu : Kekaisaran Ottoman di Turki, Kekaisaran Safawi di Persia dan Kekaisaran Mughal di India. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pertanda pergeseran kekuasaan dunia Arab yang berkembang selama periode klasik. Kekaisaran Ottoman menjadi satu-satunya kerajaan yang paling lama

bertahan dan paling berpengaruh dari tahun 1300 hingga tahun 1922 (Basri et al., 2023). Turki secara geografis terletak di bagian selatan Semenanjung Balkan, bagian barat Laut Hitam dan bagian Timur Laut Mediterania. Turki terletak di bagian Asia dan Eropa. Negara ini sendiri memiliki luas wilayah sekitar 783,562 Km² dan memiliki populasi sekitar 84 juta. (Novita Sari & Komarudin Sassi, 2023).

Bangsa Turki Berasal dari keluarga Qabey, sebuah kabilah yang memiliki karakteristik sebagai *al-Ghazw al-Turki*, yaitu bangsa Badui yang suka berperang (Saat, 2011). Kekaisaran Ottoman adalah kekuatan dunia utama pada abad ke -14 hingga ke -20. Ottoman mencapai puncak pengaruh pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman I Qanuni. Kekaisaran menguasai wilayah yang luas yang mencakup Kekaisaran Bizantium, sebagian Eropa, Austria, Afrika Utara, Asia dan Mesir. Kekaisaran ini berlangsung selama 6 abad lamanya dan diperintah oleh 36 Sultan. Masa kerajaan Turki Usmani di bagi menjadi 5 fase yaitu (Badwi et al., 2018): Pertama, Masa pembentukan kerajaan tahun 1299-1430 M. Kedua, masa kejayaan dan kemenangan atas takluknya Constatinopel tahun 1403-1566 M. Ketiga, masa Negara Islam kesatuan yang selalu ditandai dengan kelumpuhan Negara Turki Usmani. Keempat, masa perubahan sampai keruntuhannya abad ke-10. Kelima, masa pembaharuan Islam.

Perkembangan pendidikan Islam pada Kerajaan Turki Usmani tidak lepas dari pengaruh budaya dan kondisi sosial politik. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara Persia, Byzantium dan Arab. Kebudayaan Persia menanamkan ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Masalah pemerintahan, kemiliteran dan organisasi mereka dapatkan dari Byzantium. Ajaran tentang ekonomi, kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan merupakan pengaruh dari kebudayaan Arab.

Pada masa Ottoman pendidikan dimulai sejak usia dini, anak-anak mengenyam pendidikan di *Kuttab* (sekolah dasar) dan berlanjut ke *sibyan mektepleri*. Pada periode klasik, *sibyan mektepleri* umumnya didirikan oleh para pejabat atau sultan dan dibangun dalam kompleks masjid (Burhanudin et al., 2024). Anak laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam ruangan kelas yang berbeda. Setiap anak Muslim memiliki hak untuk bersekolah. Kurikulum pendidikan pada masa Ottoman berfokus pada pembelajaran Al-Quran, dasar-dasar Keislaman dan beberapa mata pelajaran dasar seperti aritmetika.

Menjelang akhir abad ke 19, modernisasi mulai diperkenalkan oleh Sultan Mahmud II dan Sultan Abdulhamis II. Golongan modernisme menganggap diperlukan metode pendidikan bangsa Eropa untuk diterapkan pada kerajaan, sekolah, kemiliteran, organisasi pemerintah dan administrasi negara untuk menciptakan Negara modern . Sistem pendidikan pada masa awal abad ke-19 mengalami masa kemunduran akibat kekalahan dari bangsa Eropa yang unggul dalam bidang sains dan peralatan perang karena pada saat itu Turki hanya berfokus pada persoalan agama saja (Badwi et al., 2018). Kemudian golongan modernisme muncul dan memberikan gagasan tersebut agar Turki tidak kalah lagi dari bangsa Eropa.

Sultan Mahmud II (1808-1839) mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam pada masa itu tidak sesuai karena hanya mengajarkan pelajaran agama sehingga masyarakat Turki tidak tertarik untuk memasukkan anaknya pada Madrasah, namun cenderung mengirim mereka untuk belajar keterampilan praktis di perusahaan-perusahaan Industry. Akibatnya banyak sekali orang-orang yang buta huruf pada masa itu. Sultan Mahmud II untuk mengatasi persoalan ini kemudian mendirikan sekolah umum *Mekteb Ma'arif* dan

Mekteb ulum Edibiya dimana siswanya dipilih dari lulusan madrasah yang bermutu tinggi. Kedua Madrasah *Mekteb Ma'arif* dan *Mekteb ulum Edibiya* mengajarkan bahasa Prancis, Ilmu Bumi, Sejarah, Bahasa Arab, dan Ilmu Politik (Saat, 2011).

Setelah itu Sultan Mahmud II mendirikan sekolah Militer, Sekolah teknik, Sekolah Kedokteran dan Sekolah pembedahan. Era pemerintahan Sultan Mahmud II, sekolah dasar berkembang pesat terdapat 355 sekolah dasar negeri dan 7 sekolah dasar swasta. Di kawasan Antolia terdapat 1.379 sekolah, terdiri 669 sekolah untuk anak laki-laki, 92 sekolah dasar khusus Puteri, 669 sekolah campuran. Memasuki periode abad ke-19 dan ke-20 kerajaan Turki Usmani yang dipimpin oleh Sultan Mahmud II mengalami gerakan reformasi yang sangat besar di bidang pendidikan.

Setelah itu Turki memasuki Era Tanzimat pada tahun 1839-1876 M. istilah Tanzimat berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *al-tanzhim* yang berarti pengaturan, penyusunan dan memperbaiki (Mujib, 2024). Secara istilah Tanzimat merupakan usaha mengatur, menyusun, dan memperbaiki struktur. Usaha-usaha ini merupakan lanjutan dari usaha yang dijalankan oleh Sultan Mahmud II yang berfokus mengadakan pembaharuan. Periode Tanzimat telah membawa perubahan dalam bidang hukum, pendidikan, dan pemerintahan. Sebelum periode Tanzimat aktivitas pendidikan kerajaan Turki dipegang oleh kelompok keagamaan-Militer. Era Tanzimat melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan yakni (Oktavia, 2022).

Pertama, pendidikan bagi umat Islam berada di bawah kontrol ulama dan diarahkan kepada pendidikan agama. Kedua, sekolah militer, kedokteran, dan akademi kemiliteran hanya diperuntukkan untuk pendidikan para anggota militer kerajaan. Ketiga, didirikan lembaga pendidikan baru diplomat dan birokrat termasuk di dalamnya badan penerjemah dan sekolah ketatanegaraan. Keempat, rencana bidang pendidikan dimulai dikembangkan lagi pada tahun 1846 M. rencana tersebut akan dilaksanakan di bawah kementerian pendidikan. Periode Tanzimar menandai perubahan lebih lanjut dalam pendidikan. Pemerintah mengatur kembali sekolah-sekolah dan menetapkan syarat bagi pengajaran, termasuk keharusan guru untuk memiliki izin resmi.

Kemunduran Turki Usmani sudah terlihat dari abad ke 18 dan faktor eksternal seperti gagasan barat tentang nasionalisme, sekularisme dan liberalisme juga turut menyebabkan keruntuhan pada tahun 1924 M. terdapat tiga unsur yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Turki Usmani yaitu (Bahri Hasibuan et al., 2023) : Kelemahan dalam sistem birokrasi, kemerosotan sosial ekonomi, dan munculnya kekuatan Eropa. Setelah runtuhnya kekhalifahan Ottoman berdirilah Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk.

Mustafa Kemal Ataturk membentuk negara berdasarkan hukum modern dan ilmiah dengan menghapus peraturan serta pengadilan agama. Sekolah agama diserahkan kepada pemerintah sekuler, mengikuti contoh peradaban barat. Pada 7 Februari 1924, ia mengeluarkan Dekrit untuk memisahkan unsur keagamaan dari sekolah dan menempatkan sekolah di bawah pengawasan kementerian Pendidikan. Simbol Islam seperti Alfabet Arab, diganti dengan alfabet latin pada 1928. Pada 1931 pendidikan agama menjadi tanggung jawab keluarga dan akhirnya pada tahun 1933 pendidikan agama resmi ditiadakan.

Kebijakan Mustafa Kemal berfokus pada tiga hal utama yaitu (Mujib, 2024) : Pertama, Nasionalisme yang berdasarkan nasionalisme Islam yang diusulkan Ziya Gokalp. Ia memandang Islam yang bercampur budaya turki bisa disesuaikan dengan modernitas,

namun menolak campur tangan agama dalam negara, karena dianggap menghambat kemajuan. Oleh sebab itu, ia memisahkan agama dari negara dan menekankan prinsip populisme dan menghapus sistem kekhalifahan. Kedua, sekularisme. Mustafa Kemal membatasi peran ulama dalam politik dan negara termasuk melarang partai atau organisasi berbasis agama. Institusi sosial, hukum, ekonomi, politik dan pendidikan dibebaskan dari pengaruh syariat. Sekularisme ini menurut Mustafa Kemal adalah kunci menuju peradaban tinggi, karena peradaban barat unggul berkat unsur-unsur modern yang menyeluruh, bukan hanya teknologi dan ilmu pengetahuan. Ketiga, Westernisme, artinya Mustafa Kemal berorientasi pada modernisasi dengan meniru nilai-nilai progresif Barat. Ia menekankan reformasi total untuk meninggalkan tradisi lama yang dianggap kaku dan kolot serta mengadopsi modernitas agar Turki dapat maju dan dihormati oleh dunia internasional.

Mustafa Kemal Atatürk menjabat menjadi presiden pertama dan menciptakan sistem kenegaraan yang sekuler dimana pendidikan dirancang untuk menghasilkan kelas pekerja terampil, produktif dan menjadi kreatif. Pendidikan di Turki telah menjadi arena perdebatan politik dan filosofis antara sekularis yang didukung militer dan kelompok konservatif agama yang diwakili oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Pada tahun 2012 AKP melakukan reformasi pendidikan, termasuk memperpanjang wajib belajar dari 8 tahun menjadi 12 tahun melalui sistem 4+4+4 (dasar menengah pertama, menengah atas) meski dianggap sebagai langkah positif kebijakan ini sering dikritik karena dianggap bermotif politik dan cenderung mendorong siswa ke jalur kejuruan daripada pendidikan umum.

Departemen Pendidikan Nasional di Turki mengelola pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, sementara perencanaan pendidikan tinggi diawasi oleh Dewan Pendidikan Tinggi (YOK) yang juga mengatur anggaran universitas dan kurikulum inti. Setelah sempat dilarang pada 1970-an, pendidikan tinggi swasta kembali diizinkan pada tahun 1981-1982 dengan syarat non profit dan kurikulum disetujui YOK. Jika dilihat dari kualitas sekolah di Turki masih tertinggal dari negara OECD, terlihat dari hasil PISA yang menunjukkan rendahnya literasi matematika, dan sains. Keterbatasan ini mendorong lebih dari 65.000 mahasiswa Turki belajar di luar negeri pada 2010, terutama ke Jerman, AS, Inggris, Austria dan Prancis. Pada tahun 2010-2011 Turki memiliki 31,170 mahasiswa internasional meningkat 100% dibandingkan 2005-2006 yang hanya 15.481. peningkatan ini dikarenakan penggunaan bahasa Inggris di universitas tinggi dan biaya kuliah yang terjangkau semakin menarik mahasiswa asing untuk datang.

Departemen pendidikan Nasional Turki juga bertanggung jawab menetapkan kurikulum sekolah dasar dan juga menyiapkan serta menyetujui alat peraga. Kurikulum yang dibuat oleh Departemen Nasional Turki selama 12 tahun wajib belajar adalah Bahasa Turki, Turki sastra, Matematika, Fisika, Chemistry, Biologi, Geometri, Sejarah Turki, Geografi, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing (Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Arab, Rusia). Struktur baru setelah reformasi 1997 mengenalkan sistem 4+4+4. Pendidikan dasar dan menengah diwajibkan selama 12 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar, 4 tahun pendidikan menengah pertama, dan 4 tahun pendidikan menengah atas. Setelah lulus dari sekolah menengah atas siswa bisa melanjutkan ke sekolah tinggi umum, teknik atau kejuruan.

Pemerintah Turki sudah banyak melakukan investasi banyak uang untuk pendidikan. Salah satu caranya adalah menciptakan program seperti "Visi Pendidikan 2023". Program ini dirancang oleh pemerintah Turki untuk meningkatkan kualitas

pendidikan. Kurikulum pendidikan Turki telah diperbarui untuk lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Fokus utama adalah pengembangan keetrampilan abad ke-21 termasuk pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaborasi. Dengan menggunakan kemajuan teknologi, Turki telah mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran melalui kelas pintar, platform e-learning, dan aplikasi pembelajaran. pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif.

Pemerintah Turki juga sudah menetapkan visi baru bagi pendidikan di negara nya yaitu berfokus pada pendidikan STEM (Pendidikan Sains, Teknologi, Teknik dan Matematik). Visi ini menekankan pentingnya pendidikan STEM untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Hal ini mencakup pengembangan program-program yang mendukung inovasi dan penelitian di bidang sains dan teknologi.

Perbandingan Pendidikan di Negara Indonesia dan Turki

Perbandingan pendidikan antara Indonesia dan Turki menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam sistem pendidikan, struktur kurikulum serta kebijakan pendidikan di kedua Negara.

Ideologi Pendidikan di Indonesia dan Turki

Ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan 'logos' yang berarti ilmu (Asril & Zaman, 2019) Istilah ideologi dicetuskan oleh Antonine Destutt de Tracy yang merupakan seorang ahli filsafat dari Perancis. Menurutnya merupakan cabang filsafat yang disebut dengan *science de ideas*. Ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia, yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan (Tyas, 2020).

Negara Indonesia mempunyai ideologi yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung lima sila, lima sila yaitu : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Turki, ideologi nya dikenal sebagai Kemalisme. Kemalisme merupakan hasil pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Kemalisme terdiri dari enam prinsip dasar atau sering disebut dengan enam anak panah , yaitu (Tabrani, 2016) Republikanisme, mengganti sistem monarki Ottoman dengan republik konstitusional yang menekankan kedaulatan rakyat dan pemerintah berdasarkan hukum. Populisme, menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan menolak dominasi Elit politik. Nasionalisme, mendorong rasa bangga dan identitas nasional di kalangan rakyat Turki. Menghilangkan pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya Ottoman yang dianggap menghambat. Lasisme, memisahkan agama dari urusan pemerintahan, memastikan bahwa negara tidak mendukung atau melarang agama tertentu. Statisme, menekankan peran aktif negara dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Reformasi, mendorong pembaharuan teknologi dan nilai-nilai modern Barat.

Ideologi Indonesia dan Turki mencerminkan nilai-nilai yang mendasari pembangunan bangsa masing-masing berdasarkan sejarah dan konteks sosialnya. Indonesia berpegang pada Pancasila sebaliknya Turki mengadopsi Kemalisme. Kemalisme menitikberatkan untuk modernisasi, pemisahan agama dari negara, serta pembaharuan

untuk membangun identitas nasional dan kemajuan teknologi. Kedua ideologi mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendasari pembangunan bangsa masing-masing sesuai konteks sosial dan budaya dan sejarahnya.

Struktur pendidikan di Indonesia dan Turki

Struktur jenjang pendidikan mencakup tingkatannya, seperti pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Setiap tingkatan ini memiliki tujuan dan kurikulum yang berbeda sesuai dengan perkembangan kognitif dan sosial pada tahap tertentu (Solehudin et al., 2023) Sistem pendidikan Indonesia mempunyai struktur 12 tahun wajib belajar yang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar (SD), 3 tahun pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Setelah itu bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sedangkan Turki, sistem pendidikan 12 tahun wajib belajar. 4 tahun sekolah dasar (SD), 4 tahun sekolah menengah pertama, dan 4 tahun sekolah menengah atas. Kemudian lanjut sekolah tinggi. Struktur pendidikan Indonesia dan Turki menunjukkan kesamaan dalam penerapan wajib belajar dan peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, meskipun terdapat perbedaan dalam pendektan sistem kurikulumnya.

Kurikulum dan Mata Pelajaran di Indonesia dan Turki

Kurikulum secara terminologis diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar (Thohri, 2023; Purba, et.al., 2023). Kurikulum di Indonesia meliputi pelajaran PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Seni, Olahraga, dan pendidikan Agama. Sedangkan Turki, Kurikulum pendidikan seperti Seni dan Kerajinan, kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, bimbingan karier, Matematika, Musik, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama dan Etika, IPA, IPS, Sejarah Turki dan Bahasa Turki, bahasa asing seperti Inggris, Prancis, Jerman sudah dikenalkan sejak kelas empat.

Kurikulum pendidikan Indonesia dan Turki dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai budaya, kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Kurikulum Indonesia menekankan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, penguatan karakter, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum nya juga merangkum pembelajaran agama, bahasa, matematika, sains dan keterampilan hidup. Kurikulum Turki fokus untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah dan kolaborasi. Penggunaan bahasa asing seperti Inggris juga ditekankan untuk meningkatkan daya saing internasional.

Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Turki

Kualitas pendidikan mencakup semua aspek dari sistem pendidikan termasuk kurikulum, pengajaran, fasilitas, manajemen, dan tenaga pendidik. Kualitas sendiri tidak hanya diukur dari prestasi akademik tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Indonesia menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, distribusi guru yang tidak merata, serta kualitas lulusan yang bervariasi (Zailani, et.al., 2024). Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia berusaha memperbaiki hasil belajar siswa melalui kebijakan baru dan peningkatan anggaran. Sedangkan Turki, memiliki reputasi yang baik dengan beberapa universitas

masuk dalam peringkat dunia. Turki terus melakukan reformasi untuk memastikan bahwa sistem pendidikannya relevan dengan kebutuhan zaman.

Aksesibilitas dan Kesetaraan Pendidikan di Indonesia dan Turki

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan berbagai program untuk memastikan keberadilan, pemerataan, dan peningkatan akses pendidikan. Program ini termasuk Dana Bos, PIP) Program Indonesia Pintar dan Platform Merdeka Mengajar. Program-program ini diharapkan bisa membantu untuk menyederakan kualitas pendidikan. Turki juga mempunyai Program EBA (*Education Information Network*). Program ini adalah platform pendidikan digital yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran terutama konteks pendidikan jarak jauh (Atmaca, 2021). Platform ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh terutama selama pandemi Covid-19. Selama pandemi EBA menjadi salah satu platform pendidikan paling banyak digunakan di Turki, dengan lebih dari 7 juta siswa dan lebih dari 1 juta guru aktif menggunakan layanan ini di Turki.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan Turki memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan sejarah, ideologi, dan tujuan nasional masing-masing negara. Di Indonesia, pendidikan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mengintegrasikan aspek keagamaan dan modernitas. Hal ini terlihat pada keberadaan madrasah yang berkembang pesat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Sementara itu, sistem pendidikan Turki berakar pada prinsip Kemalisme yang menekankan sekularisme, modernisasi, dan reformasi untuk mengadopsi nilai-nilai Barat guna mempercepat kemajuan bangsa.

Struktur pendidikan kedua negara memiliki kesamaan berupa program wajib belajar selama 12 tahun, namun pendekatannya berbeda. Di Indonesia, pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun, diikuti oleh 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Sedangkan di Turki, struktur pendidikan diatur dalam format 4+4+4, yang mencakup 4 tahun pendidikan dasar, 4 tahun pendidikan menengah pertama, dan 4 tahun pendidikan menengah atas.

Kurikulum Indonesia menekankan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, penguatan karakter, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebaliknya, kurikulum di Turki dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan penggunaan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing internasional. Pendidikan agama juga menjadi perbedaan signifikan. Di Indonesia, pelajaran agama menjadi bagian integral dari kurikulum, sedangkan di Turki, pendidikan agama lebih terbatas oleh kebijakan sekularisme. Dari sisi kualitas dan aksesibilitas, Indonesia menghadapi tantangan berupa kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil dan kualitas guru yang bervariasi.

Sebagai solusi, pemerintah mengimplementasikan berbagai program seperti BOS dan Kurikulum Merdeka. Di Turki, reformasi pendidikan berfokus pada modernisasi, integrasi teknologi, dan pengembangan program berbasis STEM untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, baik Indonesia maupun Turki dapat saling

belajar dan berbagi praktik terbaik guna menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. *Jurnal Artefak*, 7(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>.
- Ahdar. (2021). *Ilmu Pendidikan* (Musyarif, Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Asril, & Zaman, N. (2019). *Pendidikan Pancasila Kajian Historis, Ideologis, dan Agamis* (J. Alizon, Ed.). CV. Cahaya Firdaus.
- Atmaca, D. (2021). A Study on the Educational Informatics Network (EBA) Live Course Application in the "COVID-19" Pandemic Process. *Journal of Education, Theory and Practical Research*, 78(3), 301–313. <https://doi.org/10.38089/ekquad.2021.78>.
- Badwi, A., Stai, D., & Makassar, A.-F. (2018). Sejarah Pendidikan Islam di Kerajaan Turki Usmani. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1).
- Bahri Hasibuan, S., Kusdiana, A., Hernawan, W., & Boy Al, M. (2023). Keruntuhan Kerajaan Turki Ustmani Serta Implikasinya Terhadap Islam (1566-1924). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 228–233. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i3.77>.
- Basri, M., Sagala, H. P., Nasution, B. K. A., & Mahfudza, A. (2023). Dampak Kemunduran Kerajaan Turki Usmani Terhadap Pendidikan. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 2(1).
- BP, R. A., Munandar, A. S., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan Ilmu pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa :Kajian Pendidikan Islam*, 2,Nomor 1.
- Burhanudin, Ditta Maulida Rahma, Nabila Mufidah Zaen, & Gunawan Aji. (2024). Pendidikan Islam, Lembaga Pendidikan, dan Runtuhnya Dinasti Turki Usmani Terhadap Pendidikan. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 109–117. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1329>.
- Datumula, S. (2020). Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56–78.
- Dzakiyya Azizah, H., Alam, H., & Nursyaban, A. (2024). Sejarah Pendidikan di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 5, 218–224. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.458>.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Jurnal Agastya*, 9(2).
- kemendikbud. (2024, November 19). *Latar Belakang Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kodir, A. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia* (A. S. Beni, Ed.). CV.Pustaka Setia.
- Koleksi Museum. (2021, March). *PENDIDIKAN MASA KOLONIAL BELANDA*. Museum Pendidikan Nasional. <https://museumpendidikannasional.upi.edu/pendidikan-masa-kolonial-belanda/>.

- Kurnia, H., & Hudaidah, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 839–846. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.448>.
- Makmur, D., Haryono, P., Musa, S., & S, H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan* (D. Makmur, Ed.). Cv. Manggala hakti.
- Mujib, A. (2024). Model Pendidikan Islam di Turki. *JIES: Pascasarjana Universitas Islam Jakarta*, 2(2).
- Novi Septian, R., & Lilis Apriliani, S. (2022). Study Komparasi Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi Era Industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Novita Sari, & Komarudin Sassi. (2023). Perbandingan Sistem Pendidikan Turki Dan Indonesia. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 305–320. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i1.499>.
- Oktavia, N. (2022). Turki: Menuju Sistem Pendidikan Modern dalam Sebuah Masyarakat Demokrasi. *Jurnal Revorma*, 2(2).
- Potensi, T., Alam, S., & Kompetensi, A. (2021). *Pembelajaran 1. Letak Indonesia Pengaruhnya*.
- Purba, G. R., Sembiring, R. K., Hasibuan, R. W., & Rizki, S. N. (2023). Kurikulum dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 186-193. <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/154>.
- Qurota Aini, A., Wiyah, A., & Khoirunisa. (2024). Sistem Kurikulum yang Diterapkan Masa Reformasi. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2.
- Rodliyah. (2021). *Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (M. Khusnurridlo, Ed.). IAIN Jember Press.
- Saat, S. (2011). Pendidikan Islam di Kerajaan Turki Usmani . *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(1).
- Solehudin, Sutarjo, Hidayat, D., Maryati, M., Deni Asep, Mahfud, M., Mulyadi, Wistina Seneru, Niam, F., & Khasanah. (2023). *Konsep Dasar Pendidikan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Tabrani. (2016). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). *Jurnal Edukasi*, 2(2).
- Thohri, M. (2023). *Pengembangan Kurikulum* (S. Rahmi, Ed.; Vol. 1). CV. Al-Haramain Lombok.
- Tyas, D. (2020). *Mengenal Ideologi Negara* (Inung, Ed.). Alprin.
- Zailani, M., Nasution, A. F., & Siregar, N. S. (2024). Problems in Organising Non-Formal Religious Education. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(3), 486-498. <https://www.zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/259>.